



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

RANCANGAN/DRAFT

PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PARIAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PARIAMAN

- Menimbang ; a. Bahwa berdasarkan Keputusan Walikota Pariaman nomor 69/555/2020 tentang Pembentukan Tim dan Operasional Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Pariaman, menyatakan bahwa Daftar Informasi Publik yang dikecualikan ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Daftar Informasi Publik yang dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman tahun 2020;
- Mengingat ; 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4046);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1387) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);
11. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
12. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Komunikasi dan Informatika;
13. Keputusan Walikota Pariaman Nomor 69/555/2020 tentang Pembentukan Tim dan Operasional Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Pariaman;

MEMUTUSKAN ;

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan daftar informasi publik yang dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Daftar informasi publik yang dikecualikan dimaksud dalam Diktum KESATU, merupakan acuan bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman dalam pengelolaan dan pelayanan informasi.

KETIGA : Daftar informasi publik yang dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2020 telah diumumkan pada www.ppid.pariamankota.go.id sebagai laman resmi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Pariaman.

KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal Juli 2020
WALIKOTA PARIAMAN,

GENIUS UMAR

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : / /KOMINFO/2020

TANGGAL : JULI 2020

TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PARIAMAN

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN					
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PARIAMAN					
NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU	KONSEKUENSI	
			PENGECUALIAN	AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP
I. KEARSIPAN					
1	Arsip daftar orang yang masuk G30S/PKI dan organisasi terlarang lainnya	- UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h dan huruf j; - UU no 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 66 ayat 3 huruf h;	Sampai ada persetujuan dari orang yang bersangkutan/pihak berwenang	Mengungkap rahasia pribadi	Melindungi data pribadi
2	Arsip peta foto udara	- UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h dan huruf d; - UU no 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 66 ayat 3 huruf d;	Selama didalamnya terkandung potensi kekayaan alam	Mengungkap kekayaan alam dan rahasia Negara	Melindungi penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berkepentingan

3	Peta lokasi Penyimpanan Arsip	- UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h dan huruf i; - UU no 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 66 ayat 3 huruf i;	Selama masih berlaku	Mengungkap memorandum atau surat menyurat yang menurut sifatnya dirahasiakan	Kerahasiaan lokasi terjaga
4	Arsip dinamis, aktif dan inaktif	- UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 ; - UU no 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 44 ayat (1) dan (2);	Selama masih berlaku	Menghambat proses penegakan hukum	Menyediakan data lengkap yang dilindungi
II.BIDANG KEPENDUDUKAN					
5	Data Pribadi Penduduk	- UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h dan huruf i; - UU no 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 84 ayat (1), Pasal 85 ayat (1), (2) dan (3);	sampai terbitnya keputusan pejabat berwenang	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang	Melindungi rahasia pribadi seseorang
III.BIDANG PEREKONOMIAN					
6	Rencana alokasi bersubsidi	- UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 6 ayat (3) huruf b, pasal 17 huruf b dan huruf i;	sampai dengan diterbitkannya Keputusan pejabat berwenang	Dapat menyebabkan persaingan usaha yang tidak sehat dan menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan	Melindungi calon penerima bantuan dari persaingan usaha yang tidak sehat dan mengamankan proses penyusunan kebijakan

7	Rencana alokasi dana talangan untuk kota	- UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf i;	sampai dengan diterbitkannya Keputusan pejabat berwenang	Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan
IV.BIDANG KEUANGAN					
8	Database objek pajak dan retribusi	- UU No 11 Tahun 2008 tentang ITE pasal 40; - UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf j;	Sampai ada perintah dari penegak hukum/pihak yang berwenang	Dapat menyebabkan penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berhak	Melindungi database objek pajak dan retribusi
9	Dokumen proses pengadaan barang/jasa pemerintah	- UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf i dan huruf j;	sampai diketahui pemenangnya	Bertentangan dengan prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa dan etika pengadaan	Melaksanakan pengadaan barang/jasa sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa dan etika pengadaan
10	Daftar Harga Perkiraan sendiri (HPS)	- UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf i dan huruf j;	sampai diketahui pemenangnya	Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan dibidang pengadaan barang/jasa	Memperlancar proses penyusunan kebijakan dibidang pengadaan barang/jasa
11	Dokumen penawaran dari penyedia barang/jasa	- UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf i dan huruf j;	Selama proses pengadaan barang/jasa	Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	Dapat menjamin obyektifitas penilaian/evaluasi penawaran

12	Laporan pajak pribadi	- UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf i dan huruf j;	Sampai ada persetujuan tertulis dari wajib pajak yang bersangkutan	Mengungkap rahasia pribadi/data kekayaan seseorang	Melindungi rahasia (data kekayaan) pribadi seseorang
13	Laporan keuangan daerah yang belum diaudit	- UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 31 ayat (1); - UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf j;	Sampai dengan terbitnya laporan keuangan yang telah diaudit	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Membantu mencapai keberhasilan pelaksanaan pembangunan
14	Kertas kerja pemeriksaan, laporan hasil pemeriksaan dan tindaklanjutnya, review laporan keuangan	- UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf i;	Selama masih berlaku	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Membantu mencapai keberhasilan pelaksanaan pembangunan
V.BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN					
15	Kegiatan intelijen terkait dengan ideologi, politik, sosial budaya dan keamanan serta penanganan kasus yang mengganggu masyarakat	- UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf c; - UU No.3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara	Selama pengungkapannya membahayakan atau merusak sumber dan metode intelijen yang sensitive	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan Negara	Menjaga pertahanan dan keamanan negara /stabilitas daerah dan wilayah

VI. BIDANG PEMERINTAHAN					
16	Kajian pemerintah dan Berita Acara pelepasan tanah kas desa	- UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf e dan huruf i;	Sampai dengan selesainya proses pelepasan tanah kas desa	Dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional	Melindungi ketahanan ekonomi nasional
17	Kajian Teknis penetapan lokasi dan basic design pengada tanah untuk kepentingan umum/ non kepentingan umum	- UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf e dan huruf i;	Sampai terbitnya surat persetujuan penetapan lokasi pembangunan	Dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional	Melindungi ketahanan ekonomi nasional
18	Besaran harga hasil penilaian lembaga independen/appraisal untuk pengadaan tanah	- UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf e dan huruf i;	Sampai dengan selesainya proses pengadaan tanah	Dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional	Melindungi ketahanan ekonomi nasional
19	Pertimbangan teknis tukar menukar dan pinjam pakai kawasan hutan	- UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf i;	sampai dengan ditetapkannya keputusan/perjanjian tukar-menukar dan pinjam pakai	Dapat menghambat kesuksesan kebijakan	Kelancaran proses tukar-menukar dan pinjam pakai sesuai dengan ketentuan
20	Dokumen pengusulan pengesahan pemberhentian dan pengangkat kepala/wakil kepala daerah	- UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf i;	sampai penerbitan keputusan	Dapat menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Mengamankan proses penyusunan kebijakan

21	Keputusan Mendagri tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota/pimpinan DPRD	- UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf i;	sampai dengan penyerahan SK	Dapat menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Mengamankan proses penyusunan kebijakan
22	Proses penetapan keputusan Gubernur tentang Peresmian Pemberhentian dan peresmian pengangkatan pengganti antar waktu Anggota/pimpinan DPRD	- UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf i;	sampai dengan penerbitan keputusan	Dapat menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Mengamankan proses penyusunan kebijakan
VII.BIDANG KEPEGAWAIAN					
23	Daftar hasil uji kompetensi PNS	- UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf i;	Sampai ada persetujuan tertulis dari wajib pajak yang bersangkutan	Mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	Melindungi rahasia pribadi seorang PNS
24	Dokumen hasil sidang Baperjakat	- UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h dan huruf i;	Selama masih berlaku dan diperlukan dalam pengambilan keputusan yang terkait	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan

25	Daftar Pejabat yang akan dilantik	- UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf i;			
26	Data hasil tes potensi/kompetensi PNS/pejabat	- UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h;	Sampai ada persetujuan tertulis dari yang bersangkutan	Mengungkap rahasia pribadi seseorang	Melindungi rahasia pribadi seorang PNS
27	Data hasil check up perorangan PNS/pejabat	- UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h;	Sampai ada persetujuan tertulis dari yang bersangkutan	Mengungkap rahasia pribadi seseorang	Melindungi rahasia pribadi seorang PNS
28	Data hasil evaluasi kinerja PNS/pejabat	- UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h;	Sampai ada persetujuan tertulis dari yang bersangkutan	Mengungkap rahasia pribadi seseorang	Melindungi rahasia pribadi seorang PNS
29	Hasil evaluasi tenaga Pengajar dan Peserta Diklat	- UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h;	Sampai ada persetujuan tertulis dari yang bersangkutan	Mengungkap rahasia pribadi seseorang	Melindungi rahasia pribadi seorang PNS
30	Data PNS yang diduga melanggar disiplin	- UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf a dan huruf h;	sampai ada keputusan tetap	Dapat menghambat proses penegakan hukum dan mengungkap rahasia seorang PNS	Memperlancar proses penegakan hukum dan menjaga rahasia pribadi seorang PNS
31	Data rencana penempatan PNS/CPNS	- UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf i;	Sampai dengan penyerahan SK	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan

32	Dokumentasi pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dalam dan dari jabatan struktural	- UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf i;	Selama masih berlaku dan diperlukan dalam pengambilan keputusan yang terkait	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang	Mengamankan proses penyusunan kebijakan
33	SK Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dalam dan dari jabatan struktural	- UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf i;	Selama proses penetapan SK sampai dengan mulai berlakunya SK pelantikan	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan
34	Instrumen tes potensi/kompetensi PNS/pejabat	- UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf i;	Selama masih berlaku dan diperlukan dalam proses tes potensi/kompetensi PNS	Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan
35	Keputusan Penjatuhan Hukuman disiplin	- UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf a, huruf h dan huruf i;	Sampai dengan ada persetujuan dari PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tersebut	Dapat menghambat proses penegakan hukum dan mengungkap rahasia seorang PNS	Membantu kelancaran proses penegakan hukum dan melindungi rahasia pribadi seorang PNS
36	Keputusan ijin/keterangan tentang perceraian PNS	- UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf i;	Sampai dengan ada persetujuan dari PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tersebut	Dapat menghambat proses penegakan hukum dan mengungkap rahasia seorang PNS	Membantu kelancaran proses penegakan hukum dan melindungi rahasia pribadi seorang PNS

VIII.BIDANG KESEHATAN					
37	Daftar Penderita HIV/AIDS	- UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf i;	Sampai ada persetujuan tertulis dari yang bersangkutan	Mengungkap rahasia pribadi seseorang	Melindungi rahasia pribadi seorang PNS
38	Dokumen rekam medis termasuk nomor registrasi rekam medis	- UU No.29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, pasal 47 ayat (2); - UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h dan huruf i; - UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, pasal 57 ayat (1)	Sampai ada hakim/pengadilan	Mengungkap rahasia pribadi seseorang	Melindungi rahasia pribadi seorang PNS
39	Laporan kasus/diagnosis penyakit pasien	- UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h dan huruf i; - UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, pasal 57 ayat (1)	Sampai ada persetujuan tertulis dari pasien	Mengungkap rahasia pribadi pasien	Melindungi rahasia pribadi pasien
40	Identifikasi subjek penelitian dalam rangka pengembangan kesehatan	- UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h dan huruf i; - UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, pasal 44 ayat (3)	Sampai ada persetujuan tertulis dari subjek penelitian	Mengungkap rahasia pribadi pasien	Melindungi rahasia pribadi pasien

41	Rahasia kedokteran/penemuan dokter dalam rangka pengobatan dan dicatat dalam rekam medis	<ul style="list-style-type: none"> - UU No.29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, pasal 48 dan pasal 51 huruf c; - UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 6 ayat (3) huruf d dan pasal 17 huruf h dan huruf i; 	Sampai ada persetujuan tertulis dari pasien	Melanggar rahasia jabatan dan mengungkap rahasia pribadi pasien	Melindungi rahasia pribadi pasien
42	Hasil audit medik pada sarana kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> - UU No.29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, pasal 9 ayat (2); - UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h dan huruf i; 	Sampai ada persetujuan tertulis dari pasien	Dapat mengungkap rahasia pribadi pasien	Melindungi rahasia pribadi pasien
43	Hasil audit terkait dengan medical error	<ul style="list-style-type: none"> - UU No.29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, pasal 9 ayat (2) dan pasal 74; - UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP, pasal 6 ayat (3) huruf d, pasal 17 huruf h dan huruf i; 	Sampai ada persetujuan tertulis dari pasien	Dapat mengungkap rahasia pribadi pasien	Melindungi rahasia pribadi pasien

44	Daftar sediaan farmasi untuk kategori obat yang mengandung psikotropika dan atau sejenisnya	- UU No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, pasal 33 dan pasal 34; - UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pasal 14; - UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, pasal 98 - UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf i;	Sampai ada persetujuan tertulis dari pejabat berwenang	Pengelolaan sediaan farmasi bisa diketahui oleh pihak yang memiliki kewenangan	Melindungi keamanan informasi pengelolaan sediaan farmasi
IX.BIDANG PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA					
45	Daftar Hasil tes kemampuan fisik	- UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h;	Sampai ada persetujuan tertulis dari yang bersangkutan	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang	Melindungi rahasia pribadi seseorang
46	Proses scanning UN/UNPK/UASBIN	- UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf i;	Selama masih berlaku	Membocorkan rahasia negara	Melindungi rahasia pribadi seseorang
47	Hasil research and development di bidang IPTEK dan olahraga	- UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf b;	Sampai dengan diperolehnya sertifikat HAKI	Dapat mengganggu proses kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual	Melindungi hak atas kekayaan intelektual
X.BIDANG PERSANDIAN DAN TELEKOMUNIKASI					
48	Berita sandi	- UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf c angka 6;	Selama berita masih bersifat rahasia	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan Negara	Melindungi pertahanan dan ketahanan negara

49	Data spesifikasi sarana komunikasi sandi	- UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf c angka 6;	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan Negara	Melindungi pertahanan dan ketahanan negara
50	Perangkat khusus Persandian	- UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf c angka 6;	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan Negara	Melindungi pertahanan dan ketahanan negara
51	Kunci sistem sandi	- UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf i;	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan Negara	Melindungi pertahanan dan ketahanan negara
52	Penempelan jaringan, peralatan sandi dan tempat kegiatan sandi	- UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf c angka 6;	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan Negara	Melindungi pertahanan dan ketahanan negara
53	Jalur komunikasi VVIP	- UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf c angka 6;	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan Negara	Melindungi pertahanan dan ketahanan negara
54	Frekuensi Radio Komunikasi Persandian	- UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf c angka 6;	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan Negara	Melindungi pertahanan dan ketahanan negara

55	Berita/radiogram rahasia	- UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf c angka 6;	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan Negara	Melindungi pertahanan dan ketahanan negara
XI.BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL					
56	Dokumen ijin usaha pertambangan (IUP)	- UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP, pasal 6 ayat (3) huruf b dan pasal 17 huruf i;	Selama masih berlaku	Dapat menimbulkan persaingan yang tidak sehat antar pelaku usaha pertambangan	Melindungi pelaku usaha pertambangan dari persaingan yang tidak sehat
57	Laporan study kelayakan usaha tambang(Nilai Ekonomis komoditas tambang, perkiraan, jumlah cadangan, kualitas bahan tambang sebaran)	- UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf i;	Sampai dengan terpilihnya	Dapat menimbulkan persaingan yang tidak sehat antar pelaku usaha pertambangan dan mengungkap rahasia kekayaan alam	Melindungi pelaku usaha pertambangan dari persaingan yang tidak sehat
58	Data teknis potensi air tanah	- UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf d;	Selama potensi air tanah diperkirakan masih ada	Dapat mengungkap rahasia kekayaan alam	Mempermudah pengaturan dan pengeluaran SDA
XII.BIDANG INDUSTRI DAN PERDAGANGAN					
59	Dokumen Perizinan	- UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h;	Selama dokumen masih berlaku	Dapat mengungkap data perusahaan/perseorangan yang bersifat rahasia	Melindungi data perusahaan/perseorangan yang bersifat rahasia

60	Catatan Penilaian review terhadap riset unggulan daerah	- UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf i;	Selama riset masih berlangsung	Dapat menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Mengamankan kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur
61	Data Debitur dana bergulir	- UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h angka 3;	Sampai ada izin tertulis dari debitur yang bersangkutan	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang dibidang keuangan	Melindungi rahasia pribadi seseorang dibidang keuangan
62	Data keuangan Industri Kecil Menengah (IKM) dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)	- UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h angka 3;	Sampai ada persetujuan tertulis dari pemilik IKM dan UMKM	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang dibidang keuangan	Melindungi rahasia pribadi seseorang dibidang keuangan
63	Surat keterangan asal barang, penertiban surat pemberitahuan ekspor kopi, penerbitan angka pengenal impor dan dokumen lainnya dibidang perdagangan luar negeri	- UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf b;	Sampai ada izin tertulis dari debitur yang bersangkutan	Dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat	Menjaga iklim usaha kondusif
XIII.BIDANG PERTANIAN, PERIKANAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN					
64	Peta batas kawasan Hutan Digital	- UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf b;	Selama diperkirakan masih ada	Dapat menyebabkan rusaknya kekayaan negara	Melindungi batas kawasan hutan negara

65	Dokumen pelanggaran hutan yang terkait dengan peredaran penatausahaan hasil hutan/ilegal longgong/ilegal trading yang masih dalam proses	- UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf a;	Sampai dengan proses P21	Dapat menghambat proses penegakan hukum	Proses penegakan hukum berjalan lancar
66	Hasil penelitian potensi sumber daya flora dan fauna yang masih dalam proses identifikasi	- UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf d;	Setelah dinyatakan untuk publik	Dapat mengungkapkan kekayaan alam indonesia	Melindungi kekayaan alam indonesia
67	Proses penyelesaian pengusutan benih ilegal, peredaran pupuk dan pestisida	- UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf a;	Sampai selesainya proses pengusutan	Dapat menghambat proses penegakan hukum	Proses penegakan hukum berjalan lancar
68	Peta kekayaan sumber daya kelautan dan perikanan laut	- UU No 31 Tahun 2004 tentang perikanan; -UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf d dan huruf j; -UU No 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan;	Selama diperkirakan masih ada potensi sumber dayanya	Mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat	Melindungi kekayaan alam
69	Hasil uji laboratorium untuk keperluan ekspor	- UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf i;	Selama masih berlaku	Mempengaruhi pemasaran dari produk dimaksud	Perusahaan dapat memperbaiki kesalahan melalui peningkatan mutu

XIV.BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

70	Informasi Proses penyelesaian perkara yang sedang ditangani oleh PPNSLH	- UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf a;	Selama ada persetujuan tertulis dari pihak yang bersengketa	Dapat menghambat proses penegakan hukum	Membantu kelancaran proses penegakan hukum
71	Dokumen penyelesaian sengketa/konflik lingkungan	- UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf a;	Sampai dengan diserahkan kepada penuntut	Dapat menghambat proses penegakan hukum	Membantu kelancaran proses penegakan hukum
XV.BIDANG SOSIAL, KETENAGAKERJAAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT					
72	Daftar korban yang dirujuk ke pelayanan sosial khusus	- UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h;	Sampai ada persetujuan tertulis dari korban	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang/mengganggu kondisi psikologis dan traumatis	Melindungi rahasia pribadi seseorang
73	Hasil diagnosa bedah kasus kelayan penyandang HIV/AIDS dan eks WTS	- UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h;	Sampai ada persetujuan tertulis dari pasien	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang	Melindungi rahasia pribadi seseorang
74	Data Penyandang HIV/AIDS dan Eks WTS	- UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h;	Sampai ada persetujuan tertulis dari pasien	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang/mengganggu kondisi psikologis dan traumatis	Melindungi rahasia pribadi seseorang

75	Pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan/nota Pemeriksaan dan BAP	- UU No 3 Tahun 1951 tentang pernyataan berlakunya UU pengawasan perburuhan tahun 1948 NR 23 dari RI untuk seluruh Indonesia, Pasal 5; -UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf I dan huruf j;	Sampai ada persetujuan tertulis dari pimpinan perusahaan	Dapat mengungkap hasil pemeriksaan dan membuka rahasia perusahaan	Melindungi hak pribadi pengusaha
XVL.BIDANG KOMINFO					
76	Lokasi Server	- UU No 11 Tahun 2008 tentang ITE pasal 25;	Selama masih digunakan	Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan dapat menimbulkan tindakan kriminal	Melindungi hak atas kekayaan intelektual serta mengamankan data dan perangkat IT
77	Internet Protokol/IP Anddres Private	- UU No 11 Tahun 2008 tentang ITE pasal 25; - UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf b dan huruf j;	Selama masih digunakan	Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan dapat menimbulkan penyalahgunaan hak akses	Melindungi hak atas kekayaan intelektual serta hak akses
78	Bandwidth Management	- UU No 11 Tahun 2008 tentang ITE pasal 25; - UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf b dan huruf j;	Selama masih digunakan	Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan dapat menimbulkan penyalahgunaan kapasitas bandwidth	Melindungi hak atas kekayaan intelektual serta mengatur kestabilan penggunaan bandwidth

79	Sistem Management Database	- UU No 11 Tahun 2008 tentang ITE pasal 25; - UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf b dan huruf j;	Selama masih digunakan	Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan dapat mengganggu keamanan jaringan komputer	Melindungi hak atas kekayaan intelektual serta menjaga keamanan jaringan komputer
XVII.BIDANG PENEGAKAN HUKUM DAN PERDA					
80	Informasi perkara pelanggaran Perda yang sedang ditangani PPNS	- UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf a dan huruf i;	Sampai dengan selesainya proses penanganan perkara	Dapat menghambat proses penegakan hukum dan menghambat kesuksesan penyusunan kebijakan	Memperlancar proses penegakan hukum dan penyusunan kebijakan
81	Informasi hasil penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran perda	- UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf a dan huruf i;	Sampai selesai kasusnya	Dapat menghambat proses penegakan hukum dan menghambat kesuksesan penyusunan kebijakan	Memperlancar proses penegakan hukum dan penyusunan kebijakan
82	Informasi data pribadi penegakan perda	- UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf a, huruf h dan huruf i;	Sampai ada persetujuan tertulis dari penegak perda yang bersangkutan	Dapat menghambat proses penegakan hukum dan dapat mengungkap rahasia pribadi penegak perda	Memperlancar proses penegakan hukum dan penyusunan kebijakan serta melindungi rahasia pribadi penegak hukum

83	Berita acara pemeriksaan	- UU No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana - UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf a, huruf h dan huruf i;	Selama proses pemeriksaan	Dapat menghambat proses penegakan hukum dan mengungkap rahasia orang yang diperiksa	Memperlancar proses penegakan hukum dan penyusunan kebijakan serta melindungi rahasia pribadi orang yang diperiksa
84	Berkas Perkara PTUN dan perkara perdata sebelum disampaikan di persidangan	- UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf a dan huruf i;	1 (satu) Tahun	Dapat menghambat proses penegakan hukum	Memperlancar proses penegakan hukum

WALIKOTA PARIAMAN,

Dr. GENIUS UMAR, S.Sos, M.Si